

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan tinjauan literatur yang mendukung kerangka dan hipotesis. Tinjauan literatur didasarkan pada penelitian sebelumnya dan memberikan gambaran komprehensif tentang konsep dasar seputar variabel yang diteliti. Selain itu, pada bab ini penulis juga membahas tentang kerangka pemikiran terkait hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian diikuti oleh hipotesis yang akan diajukan dari variabel-variabel yang diteliti.

2.1.1 Ketimpangan Ekonomi

2.1.1.1 Pengertian Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi merujuk pada distribusi pendapatan dan kesempatan yang tidak seimbang di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Fenomena ini mencerminkan perbedaan dalam perkembangan ekonomi antara wilayah satu dengan yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal, yang pada gilirannya menyebabkan disparitas atau ketidakmerataan dalam pembangunan. Salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi adalah mengurangi ketimpangan. Meskipun peningkatan pendapatan per kapita dapat mencerminkan kemajuan perekonomian suatu daerah, hal ini tidak selalu berarti bahwa distribusi pendapatan menjadi lebih merata.

Ketimpangan adalah konsep yang lebih luas dibandingkan dengan kemiskinan. Pada dasarnya, pengukuran ketimpangan mencakup analisis sebuah populasi yang besar, bukan hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan (Khandker, Koolwal, dan Samad, 2010) dalam (Nadya & Syafri, 2019).

2.1.1.2 Teori Ketimpangan Ekonomi

Menurut Kuncoro (2006) menyatakan bahwa ketimpangan merujuk pada perbandingan standar hidup di antara berbagai lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kesenjangan antar wilayah yang diakibatkan oleh perbedaan faktor anugrah awal (*endowment factor*). Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan berbeda-beda di berbagai wilayah, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di antara wilayah-wilayah tersebut (Sukardin, 2018).

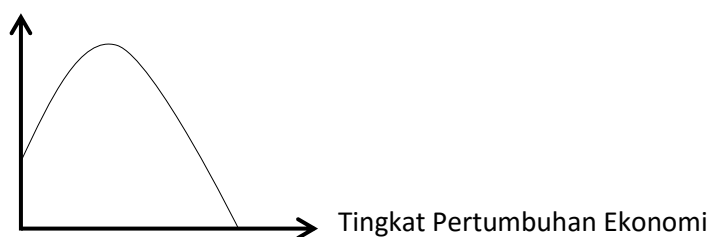
Ketimpangan antar wilayah diangkat oleh Douglas C. North dalam analisisnya mengenai Teori Pertumbuhan Neo-klasik. Dalam teori ini, ia mengemukakan sebuah prediksi yang mengaitkan tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesis ini kemudian dikenal dengan nama Hipotesis Neo-Klasik.

Dalam hipotesis Neo-Klasik, pada tahap awal pembangunan suatu negara, ketimpangan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terus berlanjut hingga mencapai titik puncaknya. Seiring dengan berlanjutnya pembangunan, ketimpangan tersebut akan mengalami penurunan. Di negara-negara berkembang, tingkat ketimpangan antar wilayah biasanya lebih tinggi

dibandingkan dengan negara-negara maju. Dengan demikian, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat digambarkan dalam bentuk huruf U terbalik.

Sebuah kajian mendalam mengenai pembangunan ekonomi dan distribusi pendapatan dapat ditelusuri hingga hipotesis kurva berbentuk U terbalik yang diperkenalkan oleh Kuznets. Kuznets mengemukakan bahwa terdapat fenomena kurva berbentuk U terbalik yang menggambarkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan selama transformasi dari ekonomi pertanian tradisional menjadi ekonomi industri modern. Dalam hal ini, distribusi pendapatan mengalami tren awal yang meningkat, diikuti dengan penurunan seiring dengan proses pembangunan ekonomi. Hal ini menciptakan suatu kurva berbentuk U terbalik, yang awalnya menunjukkan kenaikan sebelum akhirnya menurun seperti gambar 2.1 (Zhan, 2016).

Tingkat Ketimpangan



Gambar 2. 1
Kurva Kuznets

Berdasarkan teori ekonomi dual, Robinson mengembangkan sebuah model matematika yang mencakup dua departemen. Model ini menunjukkan adanya kurva berbentuk U terbalik yang mencerminkan proses pertumbuhan ekonomi, di mana awalnya sektor tersebut mengalami pertumbuhan, lalu

menyusut. Penemuan ini sekaligus mengonfirmasi hipotesis Kuznets. H. Chenery dan M. Syrquin menganalisis data pembangunan dari 53 negara untuk mengonfirmasi adanya fenomena berbentuk U terbalik yang muncul di tengah proses pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang.

Deininger dan Squire (1988) menggunakan analisis data panel untuk menunjukkan bahwa lebih dari 80% negara, hubungan berbentuk U terbalik antara tingkat pendapatan per kapita dan distribusinya tidak dapat dibuktikan secara statistik. Kuznets sendiri meyakini bahwa hubungan berbentuk U terbalik antara pembangunan ekonomi dan distribusi pendapatan bersifat kondisional. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ekonomi, sosial, kelembagaan, dan demografi.

Ketimpangan antar daerah juga dijelaskan oleh Myrdal (1957) dengan mengembangkan teori keterbelakangan dan pembangunan ekonomi dengan fokus pada ketimpangan regional baik tingkat nasional maupun internasional. Dalam penjelasannya, beliau mengemukakan konsep efek penyebaran (*spread effect*) dan efek penarikan kembali (*backwash effect*) sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pusat dan dampaknya terhadap daerah di sekitarnya. Efek sebar, atau yang dikenal dengan istilah *spread effect* merujuk pada pengaruh positif yang mendatangkan manfaat, yang meliputi aliran kegiatan investasi dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitarnya. Di sisi lain, efek balik atau *backwash effect* menggambarkan dampak negatif yang mengakibatkan kerugian, yaitu aliran penduduk dari wilayah sekitar yang dapat mengurangi modal pembangunan di area

pinggiran. Modal ini sebenarnya sangat dibutuhkan agar wilayah pinggiran dapat bersaing dan seimbang dengan perkembangan wilayah inti.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Ketimpangan Ekonomi

Ada beberapa jenis ketimpangan ekonomi yang dapat diidentifikasi, antara lain:

1. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan kondisi di mana distribusi pendapatan di masyarakat tidak merata. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pembangunan, keragaman etnis, serta adanya rezim otoriter dan pemerintah yang tidak menghargai hak milik (Glaeser EL, 2006) dalam (Rambey, 2018).

Ketidaksetaraan pendapatan merujuk pada sejauh mana pendapatan tidak terdistribusi secara merata di antara sekelompok orang. Pendapatan itu sendiri bukan hanya sekadar uang yang diterima melalui pembayaran, melainkan mencakup semua bentuk pemasukan dari berbagai sumber. Ini termasuk pendapatan dari investasi seperti bunga dari rekening tabungan dan dividen dari saham. Selain itu, pendapatan juga meliputi tunjangan negara, pensiun (baik dari pemerintah maupun yang bersifat pribadi), dan pendapatan dari sewa. Pendapatan dapat diukur baik dari perspektif individu maupun rumah tangga. Pendapatan rumah tangga sebelum dikenakan pajak, yang mencakup dana dari sistem jaminan sosial disebut sebagai pendapatan kotor. Sementara itu, pendapatan rumah tangga yang telah memperhitungkan pajak dan tunjangan dianggap sebagai pendapatan bersih.

2. Ketimpangan Bayaran/ Upah

Upah seseorang tidak selalu mencerminkan total penghasilan mereka. Upah merujuk secara khusus pada pembayaran yang diterima dari pekerjaan yang dilakukan. Pembayaran ini bisa dilakukan setiap jam, bulanan, atau tahunan, namun umumnya dibayarkan setiap minggu atau bulan. Selain itu, upah juga mungkin mencakup bonus tambahan. Oleh karena itu, ketimpangan upah mencerminkan perbedaan pendapatan di kalangan masyarakat, yang bisa saja bekerja di perusahaan yang berbeda.

3. Ketimpangan Kekayaan

Kekayaan merujuk pada total aset yang dimiliki oleh individu atau rumah tangga. Ini mencakup berbagai bentuk aset keuangan, seperti obligasi dan saham, serta properti dan hak pensiun pribadi. Dengan demikian, ketimpangan kekayaan mengacu pada distribusi aset yang tidak merata di antara kelompok orang (Fakultas MIPA IPB University, 2022).

2.1.1.4 Cara Mengukur Tingkat Ketimpangan Ekonomi

Ada berbagai cara untuk mengukur ketimpangan ekonomi, diantaranya:

1. Gini Ratio

Menurut Badan Pusat Statistik (2024), Gini Ratio atau Koefisien Gini adalah koefisien yang digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk yang ditampilkan dengan kurva Lorens. Gini Ratio mengukur tingkat ketimpangan dalam masyarakat dengan rentang nilai antara 0 hingga 1. Semakin rendah nilai Gini Ratio, semakin merata

distribusi pendapatan di antara individu-individu. Sebaliknya, ketimpangan mencapai puncaknya ketika satu orang menguasai seluruh pendapatan, yang ditandai dengan nilai Gini ratio sebesar 1.

Rumus menghitung nilai Koefisien Gini adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i (F_i + F_{i-1})$$

Keterangan :

GR : Koefisien Gini (Gini Ratio)

P_i : Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

F_i : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{i-1} : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:

- a. $G < 0,3$ = Ketimpangan Rendah
- b. $0,3 \leq G \leq 0,5$ = Ketimpangan Sedang
- c. $G > 0,5$ = Ketimpangan Tinggi

2. *Size Distribution*

Secara umum, ukuran ketimpangan dapat dihitung dengan mengukur persentase pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk terendah. Selanjutnya, ukuran ketimpangan juga dapat dianalisis dengan

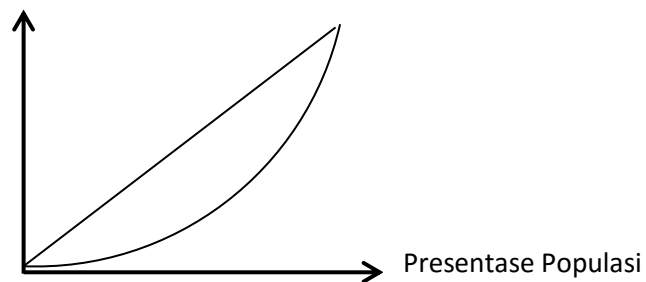
membandingkan persentase pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk paling miskin dengan persentase yang diterima oleh 20% penduduk terkaya.

- a. Tingkat ketimpangan dianggap sangat tinggi ketika 40% penduduk paling miskin hanya menerima kurang dari 12% dari total pendapatan nasional.
- b. Tingkat ketimpangan dianggap sedang jika 40% penduduk yang paling miskin memperoleh antara 12% hingga 17% dari total pendapatan nasional.
- c. Ketimpangan dianggap ringan jika 40% penduduk yang paling miskin menerima lebih dari 17% dari total pendapatan nasional.

3. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz adalah sebuah kurva yang disusun berdasarkan angka-angka yang digunakan dalam perhitungan *size distribution*, yang kemudian ditampilkan dalam bentuk grafis. Maka dapat dilihat seperti gambar dibawah ini.

Presentase Pendapatan



Gambar 2. 2
Kurva Lorenz

Berdasarkan gambar 2.2 untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan menggunakan kurva Lorenz, dapat dilihat melalui jarak antara

garis lengkung dan garis diagonal. Semakin dekat garis kurva dengan garis diagonal, semakin merata distribusi pendapatan. Sebaliknya, garis yang menjauh menunjukkan ketidakmerataan distribusi pendapatan.

2.1.1.5 Penyebab Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi. Salah satu faktor ekonomi yang sering dikaitkan dengan ketimpangan pendapatan adalah kondisi makroekonomi di suatu wilayah. Sementara itu, faktor non-ekonomi mencakup berbagai aspek seperti demografi, kondisi alam, serta politik dan budaya yang ada di wilayah tersebut.

Salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan ekonomi di suatu daerah adalah laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai seringkali tidak cukup untuk mengatasi masalah yang muncul akibat pembangunan yang belum merata. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, sementara daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat (Nurfifah et al., 2022).

Salah satu penyebab ketimpangan ekonomi yaitu ketergantungan terhadap dana pusat, banyak daerah di Indonesia yang masih sangat bergantung pada bantuan tunai dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini seringkali menghambat upaya lokal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Daerah yang lebih maju cenderung memiliki basis ekonomi yang lebih kuat dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, sedangkan daerah

yang kurang berkembang masih mengandalkan bantuan tunai sehingga berpotensi meningkatkan ketimpangan antar daerah (Saputra, 2012).

Adelman dan Morris dalam (Siallagan, 2019) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan di negara-negara berkembang, antara lain:

1. Pertambahan penduduk yang pesat telah berdampak pada penurunan pendapatan per kapita.
2. Inflasi dimana pendapatan bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertumbuhan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
4. Banyak investasi yang diarahkan pada proyek-proyek padat modal, sehingga proporsi pendapatan yang berasal dari modal menjadi lebih besar dibandingkan dengan pendapatan dari pekerjaan, yang akhirnya menyebabkan peningkatan angka pengangguran.
5. Rendahnya mobilitas sosial turut mempersulit perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.
6. Terakhir, ketidakelastisan permintaan terhadap barang ekspor menyebabkan nilai tukar semakin memburuk dalam perdagangan dengan negara-negara maju.

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

2.1.2.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan manusia (IPM) adalah sebuah indeks komposit yang berfungsi sebagai indikator untuk menggambarkan perkembangan

pembangunan manusia secara terukur dan representatif. IPM diperkenalkan pertama kali oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990. Konsep pembangunan manusia adalah suatu pendekatan yang mengedepankan pengembangan sumber daya manusia secara seimbang seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar. IPM merupakan komponen penting dalam pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, dengan penekanan pada peningkatan kualitas kehidupan manusia secara fundamental.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas hidup, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. IPM dihitung berdasarkan beberapa indikator, seperti angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan daya beli masyarakat. Melalui indikator-indikator ini, IPM mencerminkan kemajuan menuju kehidupan yang lebih baik, termasuk pengeluaran per kapita (Raiyan, 2023).

2.1.2.2 Teori Human Capital

Teori *Human Capital* berpendapat bahwa manusia merupakan aset yang sangat berharga. Dengan berinvestasi dalam keterampilan dan pengetahuan individu, kita dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan memberikan layanan profesional yang berkualitas.

Menurut Todaro dan Smith menyatakan bahwa konsep *human capital* dapat dipahami sebagai investasi yang dilakukan oleh individu dengan harapan untuk meningkatkan tingkat konsumsi mereka di masa depan (Adolph, 2016).

Secara teoritis, teori *human capital* menjelaskan bahwa keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan produktivitas ekonomi. Untuk mencapai SDM yang berkualitas, penting untuk membangun modal sosial (*human capital*). Proses pembentukan ini melibatkan pengembangan individu-individu dengan karakter yang kuat, sehingga mereka dapat berfungsi sebagai aset berharga dalam pembangunan.

2.1.2.3 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut (Statistik, 2020) menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Rumus menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) metode lama adalah sebagai berikut:

$$IPM = \frac{1}{3} (I_{kesehatan} + I_{pengetahuan} + I_{pendapatan})$$

Indikator:

Kesehatan	: UNDP = Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)
	BPS = Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	: UNDP = Angka Melek Huruf (AMH) dan
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar

BPS = Angka Melek Huruf (AMH) dan
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Standar Hidup Layak : UNDP = PDB per kapita

BPS = Pengeluaran per kapita

Pada tahun 2010, *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan perhitungan IPM dengan metode baru. Tahun 2011 dan 2014 dilakukan penyempurnaan metodologi (IPM Metode Baru). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM yaitu:

1. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) kini dianggap tidak memadai untuk mengukur aspek pendidikan secara menyeluruh, karena tidak mampu mencerminkan kualitas pendidikan yang sebenarnya. Selain itu, dengan tingginya AMH sebagian besar daerah, indikator ini tidak dapat secara efektif membedakan tingkat pendidikan antar daerah.
2. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak selalu mencerminkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
3. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dimensi lain.

Rumus menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) metode baru adalah sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pengetahuan} \times I_{pendapatan}}$$

Indikator:

Kesehatan : UNDP = Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)

BPS = Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)

Pengetahuan : UNDP = Harapan Lama Sekolah (HLS) dan

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

BPS = Harapan Lama Sekolah (HLS) dan

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Standar Hidup Layak : UNDP = PNB per kapita

BPS = Pengeluaran per kapita

Indikator yang berubah dari metode lama ke metode baru diantaranya yaitu Angka Melek Huruf (AMH) pada metode lama diganti dengan angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Kemudian, metode perhitungan sebelumnya menggunakan metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Keunggulan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) metode baru diantaranya:

1. Penggunaan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif).
2. Memasukkan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah memberikan gambaran yang lebih bermakna mengenai pendidikan dan perubahan yang terjadi.

3. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
4. Dengan menggunakan rata-rata geometrik pada saat menghitung IPM berarti kinerja suatu dimensi tidak dapat ditutupi oleh kinerja dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

2.1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi. Keberhasilan tersebut ditentukan oleh seberapa besar pertumbuhan yang terjadi sebagai hasil dari perubahan dalam produksi nasional. Perubahan produksi dalam perekonomian ini menjadi fokus utama dalam analisis ekonomi jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Ketika pertumbuhan ekonomi suatu wilayah meningkat, diharapkan manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh anggota masyarakat. Sejalan dengan Hipotesis Kuznet mengenai kurva U terbalik, distribusi pendapatan cenderung mengalami penurunan pada tahap-tahap awal pertumbuhan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kondisi tersebut akan membaik.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa. Indikator ini memainkan peran penting dalam menganalisis

perkembangan ekonomi di berbagai negara. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan sejauh mana aktivitas ekonomi dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat dalam periode tertentu (Istiqamah et al., 2018).

Simon Kuznets menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara dalam jangka panjang, yang bergantung pada kemampuannya untuk menyediakan barang-barang ekonomi kepada warganya (Annisa, 2022). Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

1. Peningkatan output yang berkelanjutan menjadi indikator utama pertumbuhan ekonomi, sementara pasokan barang mencerminkan kemampuan ekonomi sebuah negara.
2. Pengembangan teknologi memainkan peran krusial sebagai fondasi atau prasyarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
3. Untuk merealisasikan potensi pertumbuhan yang ditawarkan oleh inovasi teknologi, diperlukan serangkaian langkah yang melibatkan perubahan dalam aspek kelembagaan, sikap, dan ideologi. Dengan demikian, inovasi dalam bidang teknologi harus sejalan dengan inovasi dalam masyarakat agar kemajuan dapat terwujud secara holistik.

2.1.3.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Dari perspektif ekonom klasik, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah jumlah penduduk, jumlah alat

produksi, luas lahan serta sumber daya alam, dan tingkat penerapan teknologi (Annisa, 2022). Dalam penjelasan teori pertumbuhan klasik, kita mendapati bahwa pada tahap awal dengan jumlah penduduk yang kecil, produk marginal cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan per kapita hal ini berarti bahwa pertumbuhan populasi dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, hukum hasil yang semakin berkurang mulai berperan dalam memengaruhi fungsi produksi. Dalam kondisi ini, produk marginal dapat mengalami penurunan. Akibatnya, laju pertumbuhan pendapatan nasional serta pendapatan per kapita pun melambat.

2. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Dalam teori pertumbuhan neoklasik, konsep ini dihubungkan dengan pendekatan lain, yaitu *just in time supply*. Teori yang dikemukakan oleh Abrahamovits dan Solow menyatakan bahwa faktor produksi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penjelasan ini dapat dirangkum dalam persamaan berikut:

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

Dimana:

ΔY : Tingkat pertumbuhan ekonomi.

ΔK : Tingkat pertumbuhan modal.

ΔL : Tingkat pertumbuhan penduduk.

ΔT : Tingkat perkembangan teknologi

Analisis Solow dalam Sukirno (2012), menciptakan rumus matematika untuk persamaan yang dianalisis dan mengujinya melalui penelitian empiris. Kesimpulan dari penelitian tersebut menegaskan bahwa faktor terpenting yang mendorong pertumbuhan ekonomi tidak selalu berkaitan dengan penambahan modal atau jumlah pekerja. Sebaliknya, yang lebih krusial adalah kemajuan dalam bidang teknologi serta peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja (Annisa, 2022).

Sebagaimana diungkapkan dalam teori pertumbuhan Neo-Klasik, faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi sejatinya tidak berada di bawah kendali. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan mengacu pada pengalaman guna mengungkap peran nyata dalam pertumbuhan ekonomi, terutama terkait dengan pesatnya perkembangan faktor-faktor produksi.

2.1.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, terdapat berbagai proses yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah faktor produksi. Fluktuasi dalam laju pertumbuhan ekonomi sering kali merupakan akibat dari aktivitas produksi. Terdapat lima faktor produksi yang berperan penting dalam mempengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Daya Alam (SDA)

Menurut Sukirno (2011), faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam dan tanah. Tanah berperan sebagai media penting dalam pengembangan ilmu ekonomi, mencakup berbagai sumber daya alam seperti kesuburan tanah, lokasi dan struktur geologis, kekayaan hutan, mineral, iklim, serta sumber air. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah menjadi indikator krusial untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, sementara wilayah yang mengalami kekurangan sumber daya alam cenderung tidak dapat berkembang dengan cepat (Permatasari, 2023).

2. Organisasi

Menurut Sukirno (2011), organisasi memiliki peran yang krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Organisasi berkaitan erat dengan berbagai faktor produksi yang mendasari kegiatan ekonomi. Untuk meningkatkan peluang kerja, organisasi berfokus pada pencarian modal, pengumpulan sumber daya manusia, serta peningkatan produktivitas.

3. Akumulasi Modal

Menurut Sukirno (2011) dalam (Permatasari, 2023) menyatakan bahwa akumulasi modal atau pembentukan modal adalah peningkatan stok modal yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari pembentukan modal ini adalah untuk meningkatkan stok modal, pendapatan nasional, dan output nasional, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, akumulasi modal juga berkontribusi pada kemajuan teknologi, karena mendukung efisiensi produksi dalam skala besar, efisiensi

penggunaan sumber daya alam, serta perkembangan dalam bidang industri dan ekspansi pasar, semua ini bertujuan untuk memajukan ekonomi negara.

4. Kemajuan Teknologi

Perkembangan teknologi mendorong organisasi untuk menjadi semakin inovatif, yang pada gilirannya memicu kemajuan dalam peraturan kerja. Transformasi ini tercermin dalam regulasi produksi yang diperbarui, yang berpotensi meningkatkan produktivitas sumber daya manusia serta kinerja industri lainnya.

5. Pembagian Kerja dari Skala Produksi

Pemberdayaan buruh dapat mendorong peningkatan efisiensi dalam hasil kerja. Dengan penerapan pembagian kerja yang efektif, diharapkan produktivitas yang diinginkan dapat tercapai, sehingga memungkinkan perluasan skala produksi dalam perkembangan industri.

2.1.4 Laju Pertumbuhan Penduduk

2.1.4.1 Pengertian Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah setiap tahunnya. Setiap daerah memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, meskipun luas wilayahnya sama. Oleh karena itu, daerah yang berdekatan belum tentu memiliki jumlah penduduk yang sama.

Penduduk dapat didefinisikan sebagai seseorang yang menempati suatu daerah dengan jangka waktu yang lama. Umumnya, seseorang yang dianggap sebagai penduduk di suatu daerah adalah mereka yang Kartu Tanda

Penduduknya diterbitkan di daerah tersebut. Setiap tahunnya penduduk di Priangan Timur, Jawa Barat mengalami peningkatan. Adanya peningkatan jumlah penduduk dapat membawa dampak positif dan negatif. Positifnya, lebih banyak orang bekerja dapat meningkatkan perekonomian dan mengurangi ketimpangan ekonomi di Priangan Timur, Jawa Barat. Negatifnya, jika tidak diimbangi dengan produktivitas, akan muncul permasalahan ketimpangan ekonomi.

2.1.4.2 Teori Jumlah Penduduk

1. Aliran Marxist (Karl Marx & F. Angel)

Menurut aliran Marxist tekanan penduduk di suatu wilayah bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap lapangan kerja. Marxist berpendapat bahwa semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak juga produk yang dihasilkan, dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk. Aliran ini berpendapat bahwa populasi manusia tidak menekan makanan, tetapi mempengaruhi kesempatan kerja. menurutnya pemerataan bukan terjadi karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tetapi karena kaum kapitalis yang telah mengambil sebagian hak para buruh. Semakin tingginya tingkat populasi manusia maka semakin tinggi pula produktivitasnya (Sabiq & Nurwati, 2021).

2. Teori Kependudukan Kontemporer Emile Durkheim

Durkheim berpendapat bahwa tingginya pertumbuhan penduduk dapat mengakibatkan timbulnya persaingan diantara penduduk untuk dapat

mempertahankan hidup. Dalam memenangkan persaingan ini, tiap individu akan berusaha meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan spesialisasi tertentu. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara kehidupan masyarakat tradisional dan masyarakat perkotaan. Pada masyarakat tradisional tidak terjadi persaingan dalam memperoleh pekerjaan, tetapi sebaliknya pada masyarakat perkotaan. Hal ini disebabkan masyarakat perkotaan dan industri mengalami tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduknya yang tinggi (Sabiq & Nurwati, 2021).

2.1.4.3 Aspek Kependudukan

Aspek kependudukan mencakup jumlah dan perkembangan, pertumbuhan, persebaran, dan kepadatan.

1. Jumlah dan Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk pada suatu wilayah pada dasarnya dapat di kelompokkan sebagai suatu modal pembangunan yang mana hal ini bisa berdampak baik untuk wilayah jika di sertai dengan kualitas yang memadai baik tingkat kesehatan, pendidikan, maupun kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi sangat mendukung terhadap proses pembangunan suatu wilayah. Namun jika kondisi yang terjadi sebaliknya maka akan menjadi beban bagi pembangunan dan menjadi suatu hambatan bagi laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan (Saraswati, 2018).

2. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Terdapat beragam faktor yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk.

Contohnya, wabah penyakit, kelaparan, dan bencana alam. Selain itu, peningkatan gizi dan kesehatan dapat mengakibatkan jumlah penduduk semakin meningkat.

3. Persebaran Penduduk

Jumlah penduduk Indonesia tidak merata. Hampir 60% total penduduk Indonesia berdomisili di Pulau Jawa dan Madura. Padahal, kedua pulau ini hanya mencakup sekitar 7% wilayah Indonesia. Hal ini berdampak pada berkurangnya lahan ekonomi karena sebagian masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut memanfaatkan sebagai tempat tinggal.

4. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu daerah. Kepadatan penduduk di suatu wilayah dapat di cari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepadatan Penduduk} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Total}}{\text{Luas Wilayah}}$$

Dalam demografi, dikenal adanya kepadatan penduduk fisiologis (perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan pertanian) dan kepadatan penduduk agraris (perbandingan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan luas lahan pertanian).

2.1.5 Dana Perimbangan

2.1.5.1 Pengertian Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang dialokasikan kepada

daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri atas dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus (Azizi, 2018).

1. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi urusan daerah, baik kegiatan yang bersifat fisik maupun nonfisik. DAK dirancang untuk mendanai kegiatan tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional, serta memenuhi amanat yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

DAK sangat erat berkaitan dengan SPM yang akan dicapai. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal yakni: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Pemenuhan SPM tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah mengalokasikan DAK kepada setiap daerah (Dirjen Anggaran Kemenkeu, 2022).

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah salah satu bentuk dana perimbangan atau pendapatan transfer yang disediakan untuk pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mencapai pemerataan kemampuan keuangan

antar daerah dalam konteks pelaksanaan desentralisasi, serta untuk memenuhi kebutuhan masing-masing daerah.

2.1.5.2 Teori Dana Perimbangan

Konsep *Agency Teory* menurut Anthony dan Govindarajan dalam Budiani, (2019) adalah hubungan atau kontak *principal dan agents*. *Principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas kepentingan *principal* kepada *agent*. Teori keagenan ini telah dipraktikkan termasuk oleh pemerintah daerah di Indonesia sejak otonomi dan desentralisasi diberikan kepada pemerintah daerah sejak tahun 1999.

Teori keagenan yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori keagenan telah dipraktekkan pada sektor publik khususnya pemerintah pusat dan daerah. Ditinjau dari hubungan keagenan antara legislatif dan eksekutif, legislatif dalam hal ini DPRD bertindak sebagai *principal* dan eksekutif dalam hal ini adalah pemerintah daerah bertindak sebagai *agen* (Berliana, 2021).

Kaitan teori keagenan (*agency theory*) dalam penelitian ini dapat dilihat bahwasannya hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan, dan juga hubungan antara masyarakat yang diwakilkan oleh DPRD (*principal*) yang memberi wewenang kepada pemerintah daerah (*agent*) guna menjalankan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah yang telah disetujui menjadi Anggaran

Pendapatan Daerah sesuai peraturan pemerintah yang berlaku dan diharapkan pemerintah daerah memanfaatkan DAK dengan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mempercepat pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik.

2.1.5.3 Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Departemen Keuangan kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk:

1. Diprioritaskan untuk memberikan bantuan kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dengan tujuan mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik untuk pelayanan dasar masyarakat yang menjadi tanggung jawab daerah.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/ terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Untuk mendorong peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, dan diversifikasi ekonomi, terutama di daerah pedesaan, harus dilakukan melalui kegiatan spesifik di sektor pertanian, kelautan, dan perikanan, serta pengembangan infrastruktur.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

5. Upaya menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan dan mengurangi risiko bencana dilakukan melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup. Selain itu, penting juga untuk mempercepat penyediaan dan meningkatkan cakupan serta kehandalan pelayanan infrastruktur.
6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan.
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan antara kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus dan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian atau Lembaga serta kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke Dana Alokasi Khusus.

2.1.5.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima setiap daerah ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Alokasi dasar, yang ditentukan oleh jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di daerah
2. Jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut
3. Luas wilayah daerah

4. Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh setiap tahunnya
5. Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima dari pemerintah pusat setiap tahun.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, setiap daerah akan mendapatkan besaran DAU yang sesuai dengan kondisinya.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan langkah penting dalam mencari perbandingan dan menemukan inspirasi baru terkait hasil-hasil yang telah ada, khususnya dalam bidang “Ketimpangan Ekonomi”. Setiap penelitian yang dilakukan perlu merujuk pada hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai landasan perbandingan. Di bagian ini, akan disajikan penjelasan mengenai beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan rencana penelitian ini:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti, Tahun	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, pengangguran , dan Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2016.	Independen -Pertumbuhan Ekonomi -Jumlah Penduduk Dependen: -Ketimpangan Pendapatan	Independen: -Pengangguran	Secara parsial pertumbuhan ekonomi dan pengangguran berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan jumlah penduduk	Jurnal Ilmu Ekonomi, ISSN 2460- 6553 (online)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(Dea Fazar Ayu, Westi Riani, Meidy Haviz, 2019)			berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	
2.	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Investasi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali. (Putu Yuni, Ketut Sudibia, 2013)	Independen: -Pertumbuhan Ekonomi Dependen: -Ketimpangan Distribusi Pendapatan	Independen: -Investasi -Jumlah Penduduk yang Bekerja	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.	Jurnal PIRAMIDA Vol. XI No.1: 20-28. ISSN: 1907-3275 (online)
3.	Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2017-2021.	Independen: -Laju Pertumbuhan Ekonomi Dependen: -Ketimpangan Pendapatan	Independen: -Tingkat Kemiskinan -Upah Minimum	Pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan upah minimum regional berpengaruh positif secara	Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(Evanty Caesarisma, dan Hamrullah, 2023)			simultan tetapi tidak signifikan secara parsial	e-ISSN: 2829-2324 (online)
4.	Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Tahun 2021. (Ike Sugiarti, dan Rendra Erdkhadifa, 2023)	Independen: -Indeks Pembangunan Manusia -Jumlah Penduduk -Pertumbuhan Ekonomi Dependen: -Ketimpangan Pendapatan	Independen: -Tingkat Pengangguran Terbuka -Rata-Rata Pendidikan	Indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka serta rata-rata pendidikan berpengaruh positif dan signifikan. Sementara faktor jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Vol. 5 No. 5 E-ISSN 2656-4351
5.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. (Nur Annisa, 2022)	Independen: -Pertumbuhan Ekonomi Dependen: -Ketimpangan Pendapatan	Independen: -Tingkat Kemiskinan	Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan sedangkan tingkat kemiskinan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia	Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (online).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				periode 2015-2020.	
6.	Analisis Ketimpangan Ekonomi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2015. (Muhammad Ilham, Evita Hanie Pangaribowo, 2015)	Independen: -IPM Dependen: -Ketimpangan Ekonomi	Independen: -TPT - Kontribusi Sektor Pertanian dan Manufaktur -Penanaman Modal Asing -Penanaman Modal Dalam Negeri	IPM dan TPT berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia, sedangkan kontribusi sektor manufaktur berpengaruh positif signifikan, variabel kontribusi sektor pertanian berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi, serta variabel PMDN dan PMA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia.	Provided by Jurnal Bumi Indonesia (online).
7.	Analisis Pengaruh IPM, Pertumbuhan Ekonomi, dan TPT terhadap Ketimpangan Wilayah di Pulau Jawa	Independen: -Pertumbuhan Ekonomi -IPM Dependen: -Ketimpangan Wilayah	Independen: -TPT	IPM berpengaruh negatif dan signifikan, pertumbuhan ekonomi tidak Berpengaruh terhadap ketimpangan,	DINAMIC: <i>Directory Journal of Economic</i> Vol.2 No.3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2010-2018. (Regita Dita Zusanti, Hadi Sasana, dan Rusmijati, 2020)			dan TPT berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa tahun 2010-2018.	
8.	Dampak IPM, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Bagian Selatan. (Muhammad Ersad, Amri Amir, dan Zulgani, 2022)	Independen: -IPM Dependen: -Ketimpangan Pendapatan	Independen: -Tingkat Pengangguran -Tingkat Kemiskinan	Secara parsial variabel IPM berpengaruh negatif tidak signifikan dan tingkat kemiskinan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sementara Tingkat Pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Seluruh variabel penelitian berpengaruh secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan	Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.17. No.2, ISSN:2684- 7868 (online).
9.	Pengaruh Alokasi Dana Perimbangan Terhadap	Independen: -Dana Perimbangan	Independen: -IPM -Laju Pertumbuhan Ekonomi	Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum berpengaruh	Jurnal Edukasi Ekonomi, Universitas

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Ketimpangan Ekonomi Regional di Provinsi Jambi. (Masrida Zasriati, 2011)	Dependen: -Ketimpangan Ekonomi	-Laju Pertumbuhan Penduduk	negatif signifikan terhadap ketimpangan pembangunan sedangkan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif secara signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar Kabupaten/kota di Provinsi Jambi	Andalas (online).
10.	Analisis Pengaruh Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Investasi dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. (Deny Irawan, Baiq Saripta Wijimulawian i, Muhammad Bai'ul Hak, 2024).	Independen: -IPM -Populasi Penduduk -Pertumbuhan Ekonomi Dependen: -Ketimpangan Pendapatan	Independen: -Pengangguran -Investasi	IPM menunjukkan pengaruh positif dan signifikan ,jumlah penduduk dan pengangguran memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan, pertumbuhan ekonomi dan investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan. terhadap ketimpangan pendapatan.	Ekuilnomi: Jurnal Ekonomi Pembangun an Vo. 6 N0. 3 e- ISSN: 2614- 7181

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. (Mara judan Rambey, 2018)	Independen: -Pertumbuhan Ekonomi Dependen: -Ketimpangan Pendapatan	Independen: -IPM -LPP -Dana Perimbangan	Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia.	Jurnal Ilmu Ekonomi Vol.4 No.1 E.ISSN.2614-6061 (online).
12.	Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia. (Aufa Nadya dan Syafri, 2019)	Independen: -Pertumbuhan Ekonomi Dependen: -Ketimpangan Pendapatan	Independen: -Pendidikan -Pengangguran	Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan tanda positif tetapi tidak berpengaruh signifikan, Pendidikan menunjukkan tanda positif signifikan, dan pengangguran menunjukkan negatif signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia.	Media Ekonomi Vol.27 No.1 ISSN: 2442-9686 (online).
13.	Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.	Independen: -Dana Alokasi Khusus -Dana Alokasi Umum -Pertumbuhan Ekonomi Dependen: -Ketimpangan Pendapatan	Independen: -Dana Bagi Hasil Pajak	Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif signifikan, Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif tidak signifikan dan Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh positif tidak signifikan,	Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia (online).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(Muhammad Abdul Malik Ridho, 2021)			sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	
14.	Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017. (Dewi Septiani Dwi Kusuma, Dra. Sudati Nur Sarfiah, dan Yustirania Septiani, 2019)	Independen: -PDRB -IPM Dependen: -Ketimpangan Pendapatan	Independen: -Inflasi	Secara parsial PDRB berpengaruh positif signifikan, sedangkan inflasi dan IPM memiliki pengaruh negatif signifikan. Secara bersama-sama PDRB, inflasi, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan D.I Yogyakarta.	<i>Directory Journal of Economic</i> Volume 1 Nomor 3 (online).
15.	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,	Independen: -Pertumbuhan Ekonomi	Independen: -PAD -UMK	PDRB Perkapita berpengaruh negatif dan signifikan	Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) Vol. 2,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah Penduduk, PAD, IPM, dan UMK Terhadap Ketimpangan di Provinsi Banten. (Rosita Juliana, dan Aris Soelistyo, 2019)	-Jumlah Penduduk -IPM Dependen: -Ketimpangan		sedangkan Jumlah Penduduk dan PAD berpengaruh positif signifikan. Kemudian, IPM dan UMK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan.	No. 2 (online).
16.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, dan Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019. (Sherenia Melati Sukma, 2021)	Independen: -Pertumbuhan Ekonomi -Jumlah Penduduk Dependen: -Ketimpangan Pendapatan	Independen: -Pendidikan	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan, jumlah penduduk berpengaruh positif tidak signifikan, kemudian pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia. (online).

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, ketimpangan ekonomi di wilayah Priangan Timur menjadi fokus utama, mengingat daerah ini merupakan daerah periferi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor

yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi di wilayah Priangan Timur. Beberapa variabel yang digunakan untuk menganalisis ketimpangan ekonomi ini meliputi IPM, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pertumbuhan Penduduk, serta Dana Perimbangan. Untuk mendukung kelancaran proses penelitian, berikut adalah tampilan kerangka pemikiran yang digunakan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terjadi di suatu wilayah dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah/daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup secara merata atau biasa disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan meningkatnya nilai IPM, maka kualitas dari masyarakat suatu wilayah/daerah akan meningkat, yang mengakibatkan produktivitas masyarakat meningkat sehingga ketimpangan ekonomi pada wilayah tersebut akan menurun.

Becker menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkontribusi negatif terhadap ketimpangan ekonomi. Pendidikan formal mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Teori *Human Capital* menunjukkan bahwa pendidikan penting untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan, dengan pertumbuhan individu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Peneliti berargumen bahwa ketika setiap individu memperoleh pendapatan yang lebih tinggi akibat pendidikan yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut akan meningkat sehingga menurunkan ketimpangan ekonomi (Hakim, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma et al., (2019), Ilham (2015), Ersad et al., (2022), dan Zusanti et al., (2020) menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Menurut analisis Kuznets, pembangunan suatu negara pada titik tertentu dapat mengakibatkan ketimpangan ekonomi di masyarakat. Dalam penelitiannya, Kuznets menemukan hubungan antara tingkat ketimpangan pendapatan dan pendapatan per kapita yang membentuk pola menyerupai huruf U terbalik. Ini menunjukkan bahwa pada tahap awal pertumbuhan distribusi pendapatan atau kesejahteraan cenderung memburuk (Zhan, 2016).

Secara umum, Priangan Timur Jawa Barat mengalami pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan ini tidak merata di seluruh wilayah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi tampaknya belum dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa hanya segelintir orang dengan tingkat kekayaan tertentu yang dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Secara teoritis, laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan ekonomi. Sejalan dengan hasil penelitian dari Haykal (2022), Ayu et al., (2019), Adipuryanti & Sudibia (2015), Caesarisma (2023), Annisa (2022), Rambey (2018), dan Nadya & Syafri (2019), dalam penelitiannya pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan ekonomi.

Setiap tahunnya penduduk di Priangan Timur, Jawa Barat mengalami peningkatan. Adanya peningkatan jumlah penduduk jika tidak diimbangi dengan produktivitas, akan muncul permasalahan ketimpangan ekonomi.

Teori Kependudukan Kontemporer Emile Durkheim menyatakan bahwa tingginya pertumbuhan penduduk dapat mengakibatkan timbulnya persaingan diantara penduduk untuk dapat mempertahankan hidup. Teori kependudukan kontemporer Emile Durkheim laju pertumbuhan penduduk menunjukkan hubungan positif dengan ketimpangan ekonomi Sabiq & Nurwati (2021). Teori Durkheim, yang menekankan persaingan untuk mempertahankan hidup akibat pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan segelintir orang menjadi sangat kaya, sementara sebagian besar populasi berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar.

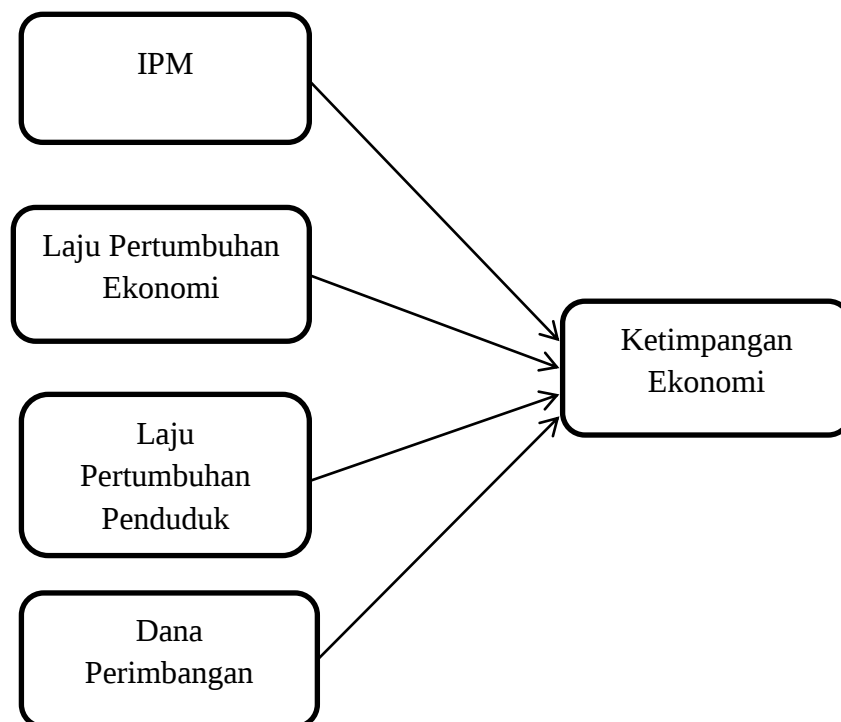
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu et al., (2019), Juliana & Soelistyo (2019), Sukma (2021), Irawan et al (2024), dan Sugiarti & Erdkhadifa (2023) dalam penelitiannya variabel laju pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap ketimpangan ekonomi.

Kapasitas setiap daerah dalam mengelola Dana Perimbangan berbeda-beda. Daerah yang memiliki kapasitas yang rendah akan kesulitan dalam pengelolaan dana perimbangan, dan berujung pada penyerapan dana yang rendah. Penyerapan dana yang rendah, menyebabkan pembangunan menjadi terhambat, dan berakibat pada ketimpangan ekonomi.

Konsep *Agency Teory* menurut Anthony dan Govindarajan dalam Berliana (2021) menunjukkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah

dalam penyaluran dana. Masyarakat diwakili oleh DPRD (*principal*) memberikan wewenang kepada pemerintah daerah (*agent*) untuk menjalankan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah. Diharapkan pemerintah daerah menggunakan DAK dengan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mempercepat pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik. Dengan demikian, Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Ekonomi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zasriati (2011), dan Muhammad (2021) menyatakan bahwa Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU dan DAK berpengaruh negatif terhadap ketimpangan ekonomi.



Gambar 2. 3
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara atau kesimpulan yang dihasilkan untuk mengatasi permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian, di mana kebenarannya masih perlu diuji secara empiris. Dengan kata lain, hipotesis adalah sebuah dugaan yang bisa saja benar atau salah. Berdasarkan landasan teori yang ada, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial IPM, dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Ekonomi di Priangan Timur, Jawa Barat Tahun 2015-2023. Sedangkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Laju Pertumbuhan Penduduk berpengaruh positif terhadap Ketimpangan Ekonomi di Priangan Timur, Jawa Barat Tahun 2015-2023.
2. Diduga secara bersama-sama IPM, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Ketimpangan Ekonomi di Priangan Timur, Jawa Barat tahun 2015-2023.